



**BAPENDA  
SULSEL**

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 2020**

## **BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

[bapendasulsel](#)

[samsatsulsel](#)

<https://t.me/bapendasulsel>

<https://bapendasulsel.web.id>

Jl. Andi Pangerang Pettarani No. 1

Telp. (0411) 873209 - (0411) 872164

Makassar 90221

## KATA PENGANTAR

Badan Pendapatan Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 berdasarkan pada Renstra Perubahan 2018 – 2023 yang dijabarkan dari RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah setingkat eselon II ke atas dituntut untuk mempersiapkan Rencana Strategis (Renstra) dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) setiap tahunnya berdasarkan sasaran yang tercantum dalam Renstra. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan dan permasalahan serta strategi pemecahan masalah yang telah dilaksanakan di sepanjang Tahun 2020.

Semoga laporan ini bermanfaat untuk melakukan introspeksi dan evaluasi atas segala yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dapat dilakukan pemberian dan perbaikan sesegera mungkin untuk dapat menjadikan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai instansi pelayanan publik yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan.

Makassar, Februari 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,  
  
H. SUMARDI S., S.Sos, M.Si  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP: 19680821 199103 1 010

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	2
<b>DAFTAR ISI .....</b>	3
<b>BAB I - PENDAHULUAN .....</b>	6
A. LATAR BELAKANG .....	6
B. GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH .....	7
C. SUSUNAN PERANGKAT DAERAH .....	9
D. SUMBER DAYA APARATUR .....	10
<b>BAB II - PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	16
A. RENCANA STRATEGIS .....	16
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 .....	20
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....	21
<b>BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	23
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	24
B. CAPAIAN KINERJA SASARAN .....	25
B. REALISASI PENDAPATAN DAN ANGGARAN .....	50
1. ASPEK PENDAPATAN DAERAH .....	50
2. ASPEK BELANJA DAERAH .....	52
<b>BAB IV - PENUTUP .....</b>	53

## DAFTAR TABEL

1.1	Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	10
1.2	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020	11
1.3	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2020	12
1.4	Jumlah PNS Berdasarkan Peta Jabatan Tahun 2020	14
1.5	Jumlah PNS Berdasarkan Sebaran Bidang Tahun 2020	15
2.1	Strategi dan Arah Kebijakan (RENSTRA) BAPENDA Sulsel Tahun 2018-2023	20
2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2019 BAPENDA Sulsel Tahun 2018-2023	21
2.3	Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 BAPENDA Sulsel Tahun 2018-2023	21
3.1	Skala Nilai Perangkat Kinerja	23
3.2	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020	24
3.3	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	25
3.4	Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil	26
3.5	Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan 2 Tahun Lalu	26
3.6	Perbandingan Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RENSTRA	27
3.7	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
3.8	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	29
3.9	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	29
3.10	Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan 3 Tahun Terakhir	30
3.11	Perbandingan Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RENSTRA	31
3.12	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
3.13	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	32
3.14	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	34
3.15	Temuan Hasil Pemeriksaan Tahun 2020	34
3.16	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tahun 2020	34
3.17	Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu	35
3.18	Temuan Hasil Pemeriksaan Tahun 2019	35
3.19	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tahun 2019	35
3.20	Perbandingan Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RENSTRA	36
3.21	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
3.22	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	37
3.23	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	39
3.24	Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan 3 Tahun Terakhir	40
3.25	Perbandingan Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RENSTRA	41
3.26	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	43
3.27	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	43
3.28	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	45
3.29	Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan 4 Tahun Terakhir	46
3.30	Perbandingan Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RENSTRA	47
3.31	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	49
3.32	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	49

## **DAFTAR GAMBAR**

1.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	9
1.2	Struktur Organisasi UPT Pendapatan Wilayah	10

## **DAFTAR GRAFIK**

1.1	Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	11
1.2	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020	11
1.3	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2020	13
1.4	Jumlah PNS Berdasarkan Peta Jabatan Tahun 2020	14
1.5	Jumlah PNS Berdasarkan Sebaran Bidang Tahun 2020	15

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Desentralisasi kewenangan menjadi konsekuensi yang harus didukung dengan semangat membangun tatanan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Hal ini dimaksudkan untuk mendukung jalannya lembaga- lembaga publik secara ekonomis, efesian efektif, transparan dan akuntabel agar cita-cita reformasi dapat terwujud. Mewujudnyatakan akuntabilitas di sektor publik dimaksudkan untuk dapat memberi dampak positif terhadap indikasi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) yang lebih baik.

Dalam rangka perwujudan prinsip akuntabilitas tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu perangkat daerah yang telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 139 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah atau LKIP yang pelaksanaannya didasarkan pada anggaran Kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pegawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan APBD yang diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peaturan perundungan pelaksanaannya. Penyusunan LKIP ini mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai alat petanggungjawaban secara periodik.

Dengan demikian LKIP adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, yang bermanfaat untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang- undangan.
2. Evaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Menciptakan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat terselenggara secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
4. Menjadi masukan dan umpan-balik, baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
5. Memelihara kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

## B. GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH

Keberadaan Badan Pendapatan daerah sebagai salah satu perangkat daerah didalam sistem pengelolaan pendapatan daerah, baik dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun berasal dari sumber- sumber pendapatan lainnya, telah terbukti mampu memberikan kontribusi nyata bagi upaya-upaya pemberdayaan potensi pendapatan daerah dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

Pada era ekonomi daerah saat ini, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat berperan lebih dalam memenuhi kebutuhan terhadap ketersediaan dana untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan, pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bab IV pasal 5 yang mengatur tentang Susunan Perangkat Daerah.

### 1. Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pendapatan daerah lainnya serta pengendalian dan pembinaan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

## **2. Fungsi**

Untuk menyelenggrakan tugas-tugas tersebut, BAPENDA mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi : Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah Lainnya Serta Pengendalian dan Pembinaan.
- b. Pengkoordinasian Penyusunan Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi : Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah Lainnya Serta Pengendalian dan Pembinaan.
- c. Pembinaan dan Penyelenggara Tugas Di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi : Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah Lainnya Serta Pengendalian dan Pembinaan.
- d. Penyelenggaran tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan bidang tugas danfungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sabagaimana disebutkan di atas, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah antara Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengatur bahwa Badan Pendapatan Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang pendapatan,
- 2) Pelatihan di bidang pendapatan,
- 3) Alokasisumber daya potensial,
- 4) Penelitian yang mencakup wilayah provinsi di bidang pendapatan,
- 5) Penyusunan kebijakan teknis serta program kerja,
- 6) Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah,
- 7) Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah,
- 8) Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

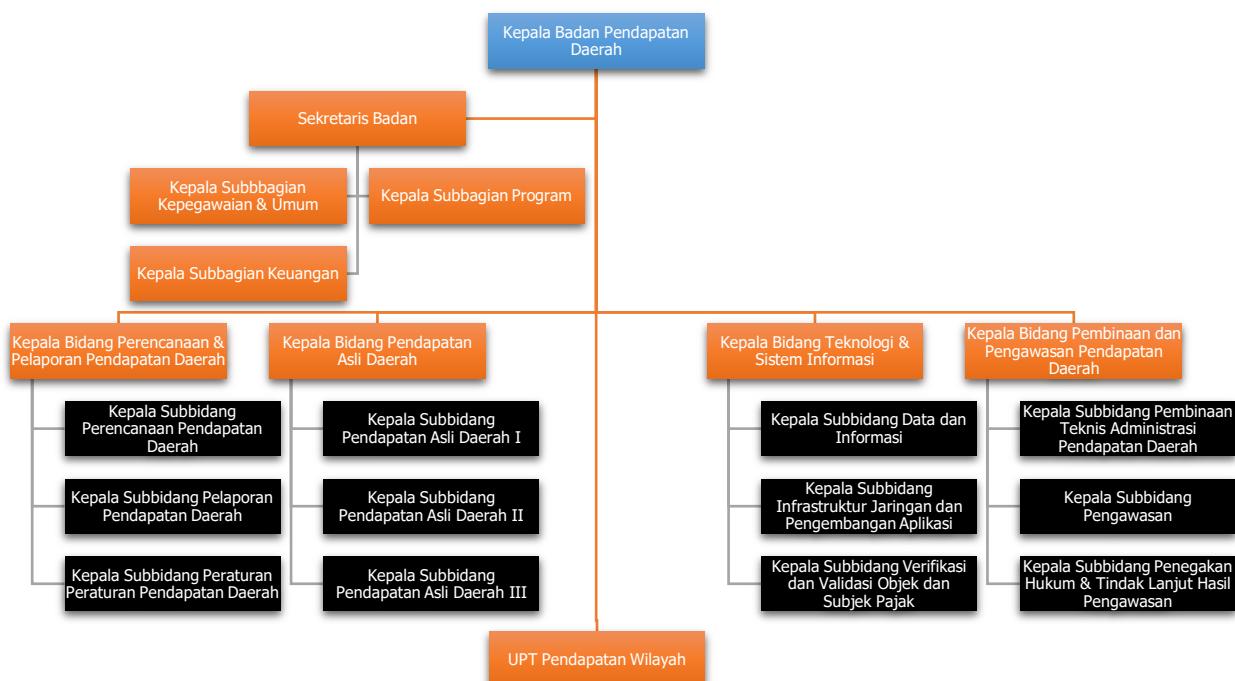
UPT Pendapatan Wilayah/Samsat sebagai kantor pelayanan, saat ini berjumlah 25 unit yang telah beroperasi melayani wajib pajak pada tiap Kabupaten/Kota yang ada

di Provinsi Sulawesi Selatan, namun tentunya masih perlu untuk terus ditingkatkan khususnya dalam memenuhi standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat wajib pajak.

Untuk itu pada Tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pemeliharaan/perbaikan beberapa kantor UPT Pendapatan Wilayah/Samsat yang tersebar di Kabupaten/Kota secara bertahap sesuai kemampuan pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

### C. SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2016

Dalam rangka melaksanakan tugas teknis penunjang tertentu, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2018, pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah (UPT) sebanyak 25 (dua puluh lima) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Struktur Organisasi UPT Pendapatan Wilayah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

**Gambar 1.2**  
**Struktur Organisasi UPT Pendapatan Wilayah**



*Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018*

#### **D. SUMBER DAYA APARATUR**

Salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah aparatur dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.

- **Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin**

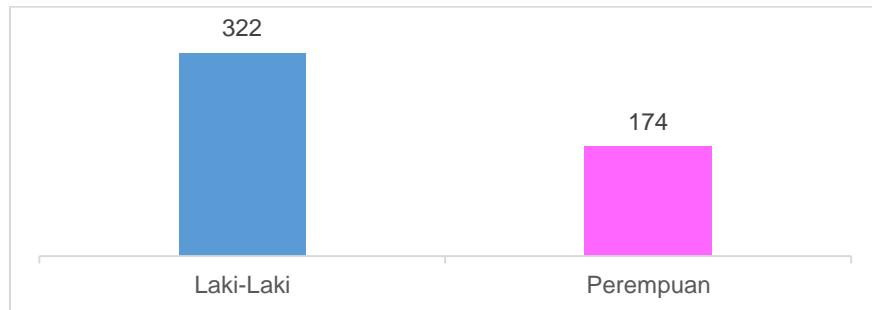
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) per 31 Desember 2020 di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Tahun 2020 sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh enam) orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) orang dan perempuan sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) orang. Mayoritas pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 64,92% sedangkan pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 35,08% sebagaimana tabel dan grafik berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-Laki	322	64,92
2	Perempuan	174	35,08
	<b>Total</b>	<b>496</b>	<b>100</b>

*Sumber : Kepegawaian BAPENDA Prov. Sulsel*

**Grafik 1.1**  
Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020



▪ **Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan**

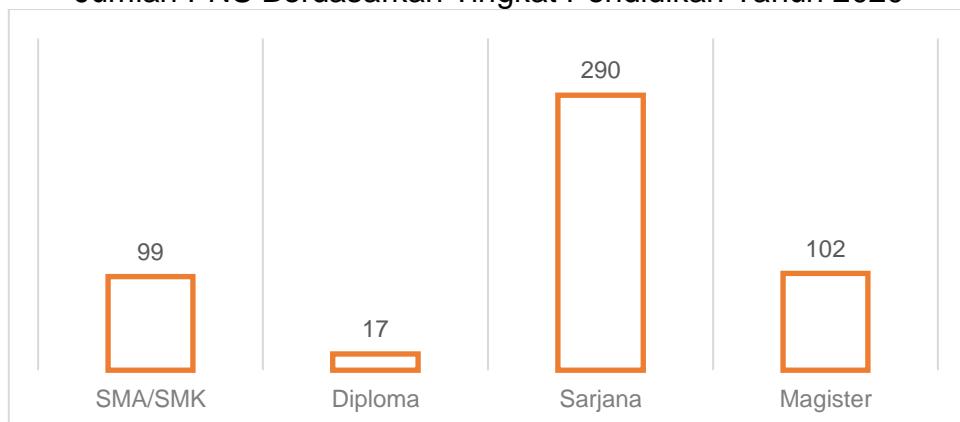
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menempuh pendidikan Strata 1 (S1) menduduki peringkat pertama, yaitu sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) orang atau 57,45%. Disusul pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 105 orang atau 21,17%. Peringkat ketiga yaitu pendidikan SMA/SMK sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang atau 17,55%. Dan di peringkat terakhir dengan jumlah paling sedikit adalah pendidikan Diploma III (D3) sebanyak 19 orang atau 3,83%. Ringkasan jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan dapat terlihat dalam tabel & grafik berikut :

Tabel 1.2  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	SMA/SMK	87	17,55
2	Diploma	19	3,83
3	S1	285	57,45
4	S2	105	21,17
	<b>JUMLAH</b>	<b>496</b>	<b>100</b>

*Sumber : Kepegawaian BAPENDA Prov. Sulsel*

**Grafik 1.2**  
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020



▪ **Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan**

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh Golongan III, yang berjumlah 351 (tiga ratus lima puluh satu) orang atau 70,77%. Golongan II menduduki peringkat kedua dengan jumlah pegawai sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang atau 15,12%. Sedangkan pegawai golongan IV sebanyak 70 (tujuh puluh) orang atau 14,11%.

Sebaran PNS Golongan II terbanyak berada di UPT Pendapatan Wilayah sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang, sedangkan paling sedikit sebanyak 1 orang berada di Bidang Perencanaan dan Pelaporan serta Bidang Pendapatan Asli Daerah. Sebaran PNS Golongan III terbanyak berada di UPT Pendapatan Wilayah sebanyak 269 (dua ratus enam puluh sembilan) orang, sedangkan paling sedikit sebanyak 8 orang berada di Bidang Teknologi dan Sistem Informasi. Sebaran PNS Golongan IV terbanyak berada di UPT Pendapatan Wilayah sebanyak 60 (enam puluh) orang, sedangkan paling sedikit sebanyak 1 orang berada di Bdang Pendapatan Asli Daerah, Bidang Pembinaan & Pengawasan Pendapatan Daerah serta Bidang Teknologi dan Sistem Informasi.

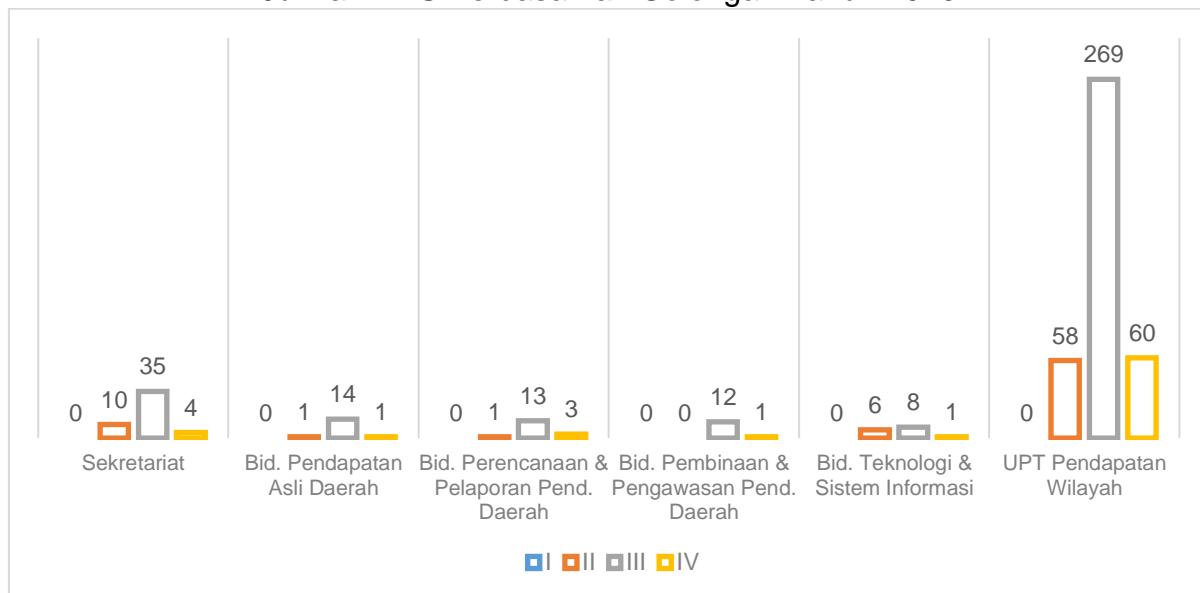
Ringkasan jumlah PNS berdasarkan golongan dapat terlihat sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Tabel 1.3  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil  
Berdasarkan Golongan Tahun 2020

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	10	35	4	49
2	Bidang Pendapatan Asli Daerah	-	1	14	1	16
3	Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	-	1	13	3	17
4	Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah	-	-	12	1	13
5	Bidang Teknologi dan Sistem Informasi	-	5	8	1	14
6	UPT Pendapatan WIlayah	-	58	269	60	387
<b>JUMLAH</b>		<b>0</b>	<b>75</b>	<b>351</b>	<b>70</b>	<b>496</b>
<b>%</b>		<b>0</b>	<b>15,12</b>	<b>70,77</b>	<b>14,11</b>	<b>100</b>

*Sumber : Kepegawaian BAPENDA Prov. Sulsel*

**Grafik 1.3**  
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2020



#### ▪ Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Peta Jabatan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan staf mendominasi peta jabatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) orang atau 76,41%. PNS Eselon IV menduduki peringkat kedua terbanyak dengan jumlah sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang atau 13,41%. Sedangkan PNS Eselon III sebanyak 30 (tiga puluh) orang atau 6,05% menduduki peringkat terakhir.

Sebaran PNS Eselon III terbanyak berada di UPT Pendapatan Wilayah sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, sedangkan di bidang lain hanya ada 1 orang. Selanjutnya, sebaran PNS Golongan IV terbanyak berada di UPT Pendapatan Wilayah sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang, sedangkan di bidang lain masing-masing sebanyak 3 orang. Jumlah PNS sebagai staf, paling banyak berada di UPT Pendapatan Wilayah sebanyak 291 (dua ratus sembilan puluh satu) orang, sedangkan paling sedikit di Bidang Pembinaan dan Pengawasan sebanyak 9 orang.

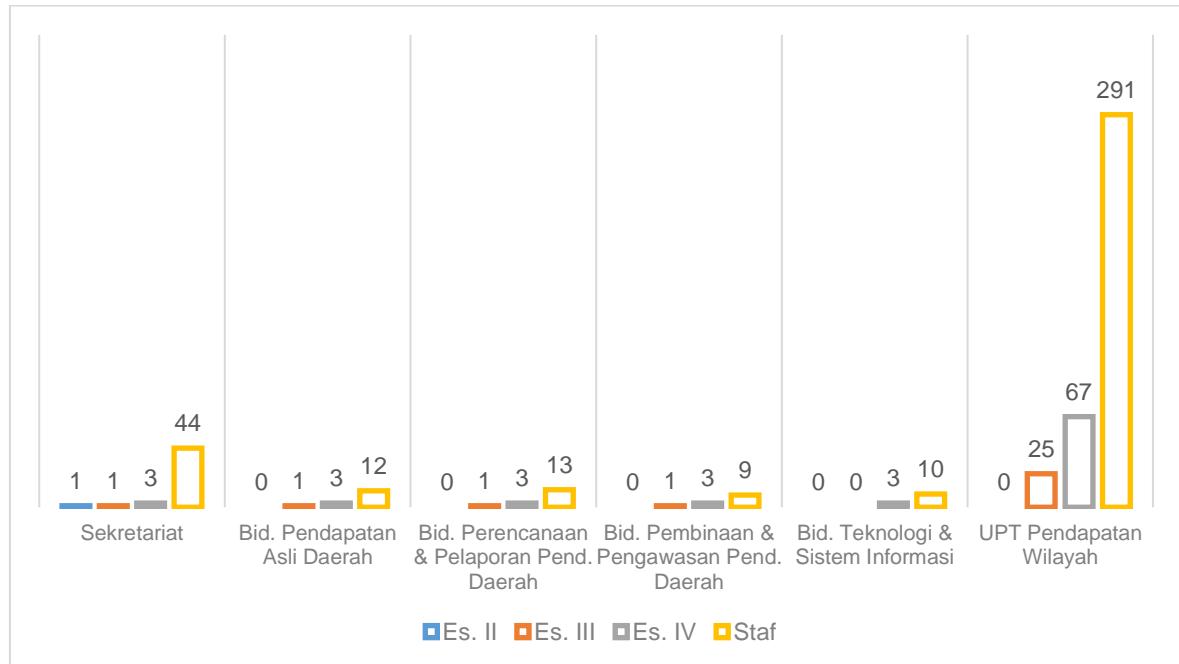
Ringkasan jumlah PNS berdasarkan peta jabatan dapat terlihat sebagaimana tabel dan grafik berikut :

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil**  
**Berdasarkan Peta Jabatan Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>Unit Kerja</b>	<b>Eselon</b>			<b>Staf</b>
		<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	
1	Sekretariat	1	1	3	44
2	Bidang Pendapatan Asli Daerah	0	1	3	12
3	Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	0	1	3	13
4	Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah	0	1	3	9
5	Bidang Teknologi dan Sistem Informasi	0	1	3	10
6	UPT Pendapatan Wilayah	0	25	67	291
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>71</b>	<b>379</b>
	<b>%</b>	<b>4,13</b>	<b>6,05</b>	<b>13,41</b>	<b>76,41</b>

*Sumber : Kepegawaian BAPENDA Prov. Sulsel*

**Grafik 1.4**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Peta Jabatan Tahun 2020**



#### ▪ Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Sebaran Bidang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan paling banyak jumlahnya berada di UPT Pendapatan Wilayah sebanyak 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) orang atau 78,02%. Lalu disusul oleh Sekretariat sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang atau 9,88%. Peringkat ketiga adalah Bidang Perencanaan dan Pelaporan sebanyak 17 orang atau

3,43% lalu disusul oleh Bidang Pendapatan Asli Daerah sebanyak 16 orang atau 3,23% kemudian Bidang Teknologi dan Sistem Informasi sebanyak 14 orang atau 2,82% dan di peringkat terakhir dengan jumlah PNS paling sedikit berada di Bidang Pembinaan dan Pengawasan sebanyak 13 orang atau 2,62%.

Ringkasan jumlah PNS berdasarkan sebaran bidang dapat terlihat sebagaimana tabel dan grafik berikut :

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil**  
**Berdasarkan Sebaran Bidang Tahun 2020**

No	Bidang	Jumlah	%
1	Sekretariat	49	9,88
2	Bidang Pendapatan Asli Daerah	16	3,23
3	Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	17	3,43
4	Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah	13	2,62
5	Bidang Teknologi dan Sistem Informasi	14	2,82
6	UPT Pendapatan Wilayah	387	78,02
	<b>JUMLAH</b>	<b>496</b>	<b>100</b>

*Sumber : Kepegawaian BAPENDA Prov. Sulsel*

**Grafik 1.5**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Sebaran Bidang Tahun 2020**

